



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perempuan dan Demokrasi: Gerakan Demokrasi Pimpinan
Aung San Suu Kyi di Myanmar dalam Film *The Lady*

Skripsi

Oleh

Farahdiena Nurulfithri

2013330207

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi



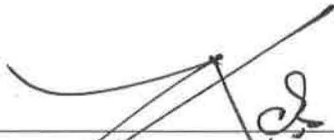
Nama : Farahdiena Nurulfithri
Nomor Pokok : 2013 330 207
Judul : Perempuan dan Demokrasi: Gerakan Demokrasi Pimpinan Aung San
Suu Kyi di Myanmar dalam Film *The Lady*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 20 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

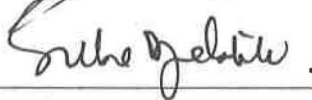
Ketua Sidang Merangkap Anggota

P. Y. Nur Indro, Drs., M.Si.

: 

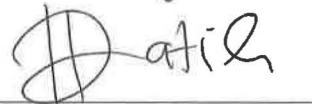
Sekretaris

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

: 

Anggota

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farahdiena Nurulfithri

NPM : 2013330207

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Perempuan dan Demokrasi: Gerakan Demokrasi

Pimpinan Aung San Suu Kyi di Myanmar dalam Film

The Lady



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2017


METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH

Farahdiena Nurulfithri

Abstrak

Nama : Farahdiena Nurulfithri

NPM : 2013330207

Judul : Perempuan dan Demokrasi: Gerakan Demokrasi Pimpinan Aung San Suu Kyi di Myanmar dalam Film *The Lady*

Myanmar, sejak tahun 1962, berada di bawah kekuasaan junta militer yang menggantikan pemerintahan dengan rezim otoriter militer. Pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh junta militer menjadi penyebab lahirnya pemberontakan pada tahun 1988 yang dibawahi oleh para aktivis mahasiswa dan biksu untuk menuntut kembalinya demokrasi. Namun, aksi demonstrasi ini disikapi oleh junta militer dengan tindak kekerasan dan memakan banyak korban jiwa. Sejak pemberontakan 1988, rakyat Myanmar berusaha melakukan gerakan perubahan di bawah pengaruh tokoh perempuan Aung San Suu Kyi yang melakukan gerakan demokrasi tanpa menggunakan kekerasan. Film *The Lady* digunakan sebagai media untuk mengetahui perjuangan Aung San Suu Kyi dalam permasalahan politik di Myanmar tahun 1988-2000. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada film *The Lady*. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal dalam memahami dan mendeskripsikan bagaimana Aung San Suu Kyi, sebagai pemimpin perempuan, memperjuangkan demokrasi di Myanmar pada tahun 1988-2000. Pada akhir penelitian, penulis menyimpulkan bahwa gerakan demokrasi yang dipimpin oleh tokoh perempuan Aung San Suu Kyi di Myanmar berhasil direfleksikan dalam film *The Lady*.

Kata Kunci: Aung San Suu Kyi, Myanmar, *The Lady*, Feminisme Liberal.

Abstract

Name : Farahdiena Nurulfithri

NPM : 2013330207

Title : *Woman and Democracy: Democracy Movement Led by Aung San Suu Kyi in Myanmar Within The Lady Movie.*

Myanmar, since 1962, has been under the authority of junta militer who replaced the government with a military authoritarian regime. The violation of human rights by the junta militer was the cause of the uprising in 1988 led by student activists and monks to demand democracy. However, the demonstration was responded by the junta militer with violence and killed many people. Since the 1988 uprising, the people of Myanmar have been trying to make a reform under the influence of female figure Aung San Suu Kyi who practices a democracy movement without violence. A movie, The Lady, is used as a medium to understand Aung San Suu Kyi's struggle during Myanmar's political issues in 1988-2000. This research aims to find out how Aung San Suu Kyi's movement during the democratization of Myanmar is reflected through The Lady movie. To achieve this goal, this research uses liberal feminism theory in understanding and describing how Aung San Suu Kyi, as a female leader, struggles for democracy in Myanmar within the year 1988 until 2000. At the end of the research, the authors concluded that the democracy movement led by Aung San Suu Kyi in Myanmar was successfully reflected in The Lady movie.

Keywords: Aung San Suu Kyi, Myanmar, The lady, Liberal Feminism.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Perempuan dan Demokrasi: Gerakan Demokrasi Pimpinan Aung San Suu Kyi di Myanmar dalam Film *The Lady*.” Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai syarat kelulusan menempuh Strata-I dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph. D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan adik penulis, Fasha dan Fattah, yang memberikan dukungan moral serta material kepada penulis dalam menyusun penelitian ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Ihsan yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis, tidak berhenti memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat serta selalu menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan untuk kerabat dekat penulis selama melakukan perkuliahan di Unpar, yaitu Josefin Evelyta Tania, Nadhire Qamara,

Jasmine Nadiko, Clara Deanty, Adam Kurdi, Bernando Halauwet, Jason Januar, Arya Mahakurnia, Amanda Shafira, Rana Dinda, Putri Sophia dan rekan-rekan FISIP Unpar lainnya.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada sahabat-sahabat penulis dari SMA yang selalu memberikan semangat, Nabawi, Kasandy Andiona, Rifa Kamila, Tamara Putri, Wiefia Aklima, Bellanisa, Dheya Shafira, Annisa Fadila, Vanisa Indah, dan Dila Fadila. Kepada tim Karya Kreasi dan Seni LKM Periode 2015/2016 dalam memberi semangat dan kenangan menjalani Program Kerja satu tahun, Rawafi Yaputra, Mabelle Nakita, Luthfi Anindito, Alvin Dwisyahputra, Akbar Ibrahim, Anastasia Anggita, Irene Hadi, Jessica Puspitasari, Nathaniel, Putri, Rendy Nugraha, Samuel Reggie dan Felicia Tjandra. Terima kasih kepada semua dukungan dan semangat yang teman-teman lainnya berikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis susun masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan membantu kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini juga dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Farahdiena Nurulfithri

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7 Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
PEREMPUAN DAN DINAMIKA DEMOKRASI MYANMAR TAHUN 1988-2000	25
2.1 Gambaran Umum Myanmar.....	25
2.1.1 Konsep Kekuasaan Terkait dengan Gender.....	28
2.1.2 Status Sosial Perempuan Myanmar.....	30
2.2 Politik dan Pemerintahan Myanmar era Junta militer.....	35
2.3 Latar Belakang Aung San Suu Kyi.....	40
2.3.1 Keterlibatan Aung San Suu Kyi dalam Aksi Demokrasi.....	42

BAB III	48
FILM <i>THE LADY</i> SEBAGAI REPRESENTASI PERJUANGAN PEREMPUAN DI MYANMAR	48
3.1 Tinjauan Umum Film <i>The Lady</i>	48
3.1.1 Sinopsis Film <i>The Lady</i>	50
3.1.2 Produksi Film <i>The Lady</i>	54
3.1.3 Distribusi Film <i>The Lady</i>	59
3.1.4 Ulasan Internasional Tentang Film <i>The Lady</i>	60
BAB IV	63
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM GERAKAN DEMOKRASI YANG DIMPIMPIN OLEH AUNG SAN SUU KYI DI MYANMAR PADA FILM <i>THE LADY</i>	63
4.1 Gerakan Demokrasi Dibawah Pimpinan Aung San Suu Kyi	63
4.1.1 Aung San Suu Kyi Sebagai Pemimpin Oposisi	65
4.1.2 Pidato di Depan Pagoda Shwedagon.....	70
4.1.3 Membentuk Partai NLD (<i>National League for Democracy</i>)	73
4.1.4 Kampanye dan Pidato ke Berbagai Daerah.....	75
4.1.5 Menerima Nobel Peace Prize 1991	77
4.2 Reaksi Pemerintah Junta militer terhadap Gerakan Demokrasi Aung San Suu Kyi.....	79
4.2.1 Hambatan Saat Berkampanye	81
4.2.2 Dihadapkan Tahanan Rumah oleh Junta militer.....	83
4.2.3 Hasil Pemilihan Umum 1990.....	85
BAB V	88
KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Pemilu di Myanmar tahun 1990.....	45
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 David Thewlis sebagai Michel Aris.....	51
Gambar 3.2 Michelle Yeoh dalam Film <i>The Lady</i> dan Aung San Suu Kyi.....	57
Gambar 4.3 Aung San Suu Kyi sebagai Pemimpin.....	68
Gambar 4.4 Pidato Aung San Suu Kyi di depan Shwedagon Pagoda.....	72
Gambar 4.5 Pendirian Partai <i>National League for Democracy</i> (NLD).....	74
Gambar 4.6 Aksi Kampanye Aung San Suu Kyi ke Berbagai Daerah.....	77
Gambar 4.7 Pemberian Penghargaan Nobel Peace Prize 1991.....	79
Gambar 4.8 Diskusi oleh Para Militer untuk Menyingkirkan Suu Kyi.....	81
Gambar 4.9 Insiden di Irrawaddy Delta.....	83
Gambar 4.10 Penangkapan Aung San Suu Kyi dalam Tahanan Rumah.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan demokrasi di suatu negara merupakan urusan domestik negara yang bersangkutan, tetapi fenomena hubungan internasional di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di suatu Negara, terlebih jika hal yang bersangkutan sudah menjadi bagian dari isu hubungan internasional, maka akan dapat perhatian dari masyarakat internasional. Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat modern. Implementasi contohnya melalui kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak individu yang mesti diperjuangkan. Pemerintah di negara manapun berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke pemerintahan yang demokratis.¹ Salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat internasional adalah mengenai perjuangan tokoh perempuan Aung San Suu Kyi dalam perkembangan politik yang terjadi di Myanmar, khususnya menyangkut isu demokratisasi di negara tersebut. Myanmar tengah menghadapi persoalan serius dalam perkembangan situasi politiknya, dimana prinsip-prinsip demokrasi yang

¹ Awani Irewati, *Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi*, Vol. 4, No. 1 (2007), hal. 10-14

seharusnya dijunjung tinggi tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari rezim militer yang berkuasa.

Dalam proses demokratisasi Myanmar tahun 1988 yang mengarah pada rezim militer bersifat otoritarian terhadap rakyatnya sendiri, Aung San Suu Kyi merasa tergerak untuk melakukan gerakan yang menuntut perubahan dan kebebasan mengusung demokrasi. Sejarah transisi demokratisasi di Myanmar secara kronologis diawali ketika Myanmar mendapatkan kemerdekaannya dari kolonialisme Inggris pada tanggal 4 Januari 1948 yang dipimpin oleh Jenderal Aung San (ayah Aung San Suu Kyi). Namun, junta militer Jenderal Ne Win melakukan kudeta dan menggantikan pemerintahan Jenderal U Nu yang demokratis pasca kemerdekaan. Junta militer berkuasa menduduki pemerintahan dengan menerapkan praktek diktator militer sehingga Myanmar semakin sulit untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Rezim militer mengambil alih seluruh aspek yang ada di Myanmar baik dalam penguasaan aspek politik maupun sosial. Pemerintahan otoriter yang dijalankan oleh Junta militer, dipimpin oleh Jenderal Ne Win sejak tahun 1962, memiliki dampak politik bagi perempuan. Salah satu tantangan partisipasi politik perempuan selalu menghadapi pandangan serta interpretasi agama dan budaya yang masih sangat patriarkal. Dengan demikian, Aung San Suu Kyi, sebagai aktivis perempuan tidak hanya berjuang untuk rakyatnya, namun juga berjuang untuk mengubah pandangan bahwa meskipun berada dalam budaya patriarki perempuan tidak selalu sebagai posisi subordinat. Posisi subordinat tersebut yang membuat perempuan masuk ke dalam peran gender dimana perempuan tidak seharusnya berjuang di ranah politik.

Perkembangan komunikasi internasional dan revolusi teknologi informasi membuat media lebih leluasa berperan dalam negara sebagai aktor baru yang muncul untuk menyebarkan budaya. Interaksi diantara berbagai macam aktor di dunia internasional membuat dunia menjadi tanpa batas. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Era globalisasi ini menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, bangsa, bahkan individu.² Seiring dengan pergerakan perempuan yang menunjukkan semangat kesetaraan gender, media merupakan salah satu sarana yang dapat membantu mengubah kehidupan perempuan menjadi lebih baik dengan cara penyebaran informasi ke masyarakat internasional. Sehingga, perempuan dapat menentukan dan mengapresiasi keinginan dalam hidupnya. Penyebaran komunikasi tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah karena jangkauannya yang luas serta akses informasi relatif lebih mudah didapatkan melalui internet, televisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, revolusi ini mempercepat penyebaran gagasan-gagasan tentang perempuan dalam politik yang semakin membuka mata masyarakat dunia.

Dalam menyebarkan gagasan-gagasan tentang perempuan superior dan tidak hanya terkungkung dalam kehidupan privatnya sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga, diperlukan sebuah medium yang mampu menjangkau masyarakat internasional, salah satunya adalah film. Film merupakan media untuk menemukan, mengembangkan, dan memanipulasikan pengalaman para pembuatnya, menciptakan

² James H. Mittleman, *Globalization: Critical Reflections*, Colorado: Lynne Rinner Publishers, 1997, Hal. 229

bentuk personal atau struktur yang pada waktu bersamaan menggunakan subjek sebagai objek dan memberikannya arti atau nilai-nilai tertentu.³ Film menjadi salah satu produk budaya yang digemari oleh masyarakat karena dapat menghadirkan unsur audio visual secara bersamaan untuk menyampaikan pesan serta merefleksikan realitas sosial. Kekuatan yang dimiliki film dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, salah satunya adalah dengan menjadikannya sebagai alat komunikasi internasional.

Sehubungan dengan ketertarikan masyarakat terhadap film, pesan yang tersirat dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami dan membentuk sebuah umpan balik bagi masyarakat yang menonton. Film dinyatakan menjadi media massa yang sesungguhnya dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan cepat.⁴ Selain itu, film juga dapat membuat individu memahami pandangan dunia dari peradaban negara lain, atau kehidupan dan problematika kemanusiaan. Hubungan antara film dan kekuasaan terbentuk untuk melakukan dominasi dan hegemoni terhadap masyarakat.

Banyak film yang mengusung tema perempuan, seperti *Mulan*, *Frida*, *Iron Jawed Angels*, *The Iron Lady*, dan sebagainya. Film-film tersebut mempunyai satu kesamaan, yakni menggambarkan superioritas serta sosok perempuan yang kuat dan sempurna. Seiring dengan pergerakan perempuan yang mengundang semangat kesetaraan gender, film merupakan salah satu media yang dapat membantu dalam

³ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, Swedish: SAGE Publications Ltd, 2010, hal. 32-34

⁴ Ibid

proses komunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini membahas film yang berjudul *The Lady*, karya sutradara Luc Besson yang merepresentasikan citra perempuan yang superior. Penggambaran peran superior perempuan melalui film ini memiliki dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat, sehingga penulis mengkaji gerakan demokrasi perempuan, Aung San Suu Kyi pada masa demokratisasi Myanmar yang direfleksikan dalam film *The Lady*.

1.2 Identifikasi Masalah

Gejolak politik yang terjadi di Myanmar disoroti dalam pemberitaan dunia internasional karena sistem pemerintahannya selama puluhan tahun dipertahankan oleh rezim otoriter Junta militer. Myanmar menganut budaya patriarkal yang mendominasi kaum laki-laki di atas perempuan. Gambaran perempuan dalam masyarakat dibuat oleh kaum patriarkal dengan menempatkan perempuan di posisi subordinat. Perempuan tidak dapat menjadi dirinya sendiri dan justru diharuskan untuk tunduk pada laki-laki. Bila perempuan melihat dirinya sendiri, yang ia lihat adalah perempuan yang sesuai dengan gambaran laki-laki, yaitu manusia yang lemah dan tidak rasional.⁵ Bila hal ini terus berlanjut, perempuan tidak akan pernah menemukan jati dirinya sendiri karena selalu dibawah bayang-bayang gambaran laki-laki.

Pandangan masyarakat tradisional tentang moralitas perempuan ialah pertama, perempuan direndahkan karena kewajibannya yang harus tunduk seperti ketaatan,

⁵ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Bandung: Jelasutra, 1998), hal. 18

diam, dan kesetiaan. Kedua, permasalahan moral perempuan (memasak, ibu rumah tangga, merawat, dsb) dianggap tidak menarik atau tidak terlalu penting untuk dibahas. Ketiga, terdapat asumsi bahwa perempuan, rata-rata, tidak terlalu berkembang secara moral dibanding laki-laki. Keempat, perempuan dianggap tidak mempunyai hak atas sifat-sifat kemaskulinan seperti kemandirian, otonomi, pikiran, alasan, budaya, dominasi, perang, dan kematian. Tetapi, karakter-karakter perempuan seperti ketergantungan, tubuh, emosi, perdamaian, dan kehidupan tetap diremehkan. Terakhir, gagasan moral laki-laki dianggap lebih tepat, contohnya penilaian tentang tindakan tertentu, perdebatan, perjanjian kontrak, dan penilaian tentang moral.⁶ Pada kenyataannya, kesalahan interpretasi tentang isu moral perempuan ini telah diabaikan oleh masyarakat internasional.

Dalam struktur sosial yang berkembang di masyarakat, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas, khususnya dalam masyarakat yang secara umum bersifat patrilineal yang berarti memuliakan kaum laki-laki dalam semua aspek kehidupan.⁷ Peran gender tersebut menjadi fenomena yang selalu diperbincangkan dan terus berkembang hingga saat ini. Pada dasarnya, semua feminis terbentuk dari kesadaran telah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasa cemas yang timbul akibat kesadaran mengenai posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat memicu munculnya gerakan sosial yang menimbulkan pemikiran individu yang menginginkan perubahan. Permasalahan

⁶ Alison Jaggar, "Feminist Ethics", dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2008, hal. 181

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 73-76.

keterbelakangan perempuan dalam pandangan kaum feminis bukan semata-mata kesalahan dari berbagai teori, melainkan akibat dari sikap ketidakpedulian dan pemikiran irasional masyarakat yang percaya akan sifat konservatif mereka.⁸ Pada konteks yang terkait, terdapat berbagai pertanyaan dan pandangan tentang kemampuan perempuan dalam aspek politik, yakni tentang dominasi dan subordinasi.

Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah ketika melihat citra perempuan yang selalu mencerminkan sosok yang tidak teguh pendirian, tidak cerdas, tidak dapat memimpin, dan lain sebagainya menciptakan penyajian citra yang tidak lebih sosok yang subordinat. Berbeda dengan tampilan laki-laki, yang biasanya dibuat sosok yang sempurna dengan kemampuannya menguasai perempuan. Dalam kasus gender, film dijadikan sebagai alat komunikasi internasional yang disebabkan oleh pencapaiannya dalam menggambarkan realitas. Pencapaian film tersebut memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh bagi pergerakan perempuan dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Film adalah media untuk menemukan, mengembangkan, dan memanipulasikan pengalaman para pembuat film tersebut, menciptakan bentuk-bentuk personal atau struktur yang pada waktu bersamaan menjadikan subjek sebagai objek, memberinya arti dan nilai-nilai.⁹ Secara umum, film pada suatu negara mencerminkan kondisi sosial dan budaya bangsa tersebut karena setiap negara

⁸ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal. 149

⁹ Idi Subandy Ibrahim, *Ecstasy, Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 101.

memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, maka segala dinamika dan pertumbuhan film di masing-masing negara berbeda pula.

Film feminis menyajikan citra perempuan yang terlihat sebagai korban dari struktur masyarakat tetapi kemudian bangkit dan memperoleh hak atas hidupnya. Sehingga melalui proses identifikasi, seorang perempuan dapat menemukan arti hidupnya yang direpresi melalui film.¹⁰ Film-film yang mengangkat tema feminis menampilkan citra perempuan yang berangkat sebagai korban dari struktur masyarakatnya sendiri tetapi tetap bangkit dan menjadi luar biasa dalam artian memperoleh kekuasaan dan kendali tertentu atas hidupnya. Sehingga, melalui proses identifikasi, seorang perempuan dapat menemukan artikulasinya yang direpresi dalam dunia yang dialaminya melalui film. Singkatnya, penggunaan film dalam kehidupan sosial tidak hanya sebagai media hiburan, namun konten dan informasi yang disajikan memiliki pengaruh signifikan dalam proses sosial. Konten dari media tersebut merupakan konsumsi pikiran bagi masyarakat, jadi apa yang ada di dalam media akan mempengaruhi gagasan dan pendapat publik. Realitas yang dibentuk oleh media mendasari respons dan tingkah laku masyarakat. Bertolak dari landasan di atas, film *The Lady* memiliki kecenderungan pokok untuk menempatkan perempuan sebagai subjek budaya. Kecenderungan tersebut dapat dilihat melalui berbagai peristiwa yang sengaja ditampilkan oleh pembuatnya, guna mengungkap dan mengangkat eksistensi kaum perempuan untuk melawan dominasi kekuasaan patriarki.

¹⁰ Aquarini Priyatna Prabasmoro, *Kajian Budaya Feminis Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006, hal. 337

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengangkat perjuangan perempuan dalam dinamika demokrasi Myanmar melalui media film. Dari sejumlah film berperspektif perempuan, penulis akan memfokuskan penelitian kepada film *The Lady* karena mengangkat kehidupan nyata seorang aktivis perempuan yang memperjuangkan demokrasi dan memposisikan dirinya sebagai oposisi pemerintah Junta militer yang superior. Film *The Lady* menceritakan proses demokratisasi Myanmar pada tahun 1988-2000 dengan perjuangan Aung San Suu Kyi sebagai tokoh feminis yang memperjuangkan demokrasi tanpa kekerasan dalam memperbaiki kericuhan politik di Myanmar.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan riset yang diajukan penulis adalah **“Bagaimana representasi perempuan dalam gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada film *The Lady*?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana representasi perempuan dalam gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada film *The Lady*. Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah

menambah pengetahuan tentang representasi perempuan dalam film, mengetahui proses perjuangan demokrasi yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar tahun 1988-2000, dan sebagai referensi bagi para pembaca yang memiliki minat dalam bidang media, khususnya film, yang berhubungan dengan studi ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kajian. Kajian literature pertama merupakan buku yang berjudul *Aung San Suu Kyi: Activist for Democracy in Myanmar* karya Judy L. Hasday. Buku ini membahas membahas peran Aung San Suu Kyi sebagai aktivis pro demokrasi. Hasday juga mengupas secara menyeluruh kejadian-kejadian historis yang terjadi di Myanmar di masa lalu dari masa pre-kolonial Inggris. Hasday membagi tulisannya ke dalam tiga bagian; bagian pertama membahas mengenai asal muasal beragam etnis dan penduduk yang mendiami wilayah-wilayah Myanmar dan bagaimana kemudian keberagaman ini menjadi akar konflik, potensi sumber daya alam yang dimiliki Myanmar dan ajaran Buddha yang mempengaruhi kehidupan sosial, budaya dan beragama masyarakat Myanmar. Sementara itu, bagian kedua tulisan Hasday membahas mengenai masa pendudukan Inggris dan Jepang serta perjuangan tokoh-tokoh Myanmar dalam mencapai kemerdekaan, dan bagian terakhir menceritakan mengenai kekejaman rezim militer,

kehidupan pribadi Aung San Suu Kyi hingga akhirnya terlibat dalam gerakan pro demokrasi dan menjadi tokoh yang penting dan menginspirasi.¹¹

Literatur yang kedua merupakan buku yang ditulis langsung oleh Aung San Suu Kyi yang berjudul *Freedom from Fear: and Other Writings* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1991. Buku ini berisi koleksi tulisan Aung San Suu Kyi yang diedit oleh almarhum suaminya, Michael Aris. Bab pertama dalam buku ini dimulai dengan sebuah cerita tentang perjalanan ayahnya, Aung San, yang merupakan seorang pejuang kemerdekaan Myanmar melawan Inggris pada tahun 1940an. Aung San dibunuh oleh tentara oposisi pada tahun 1947, tepat sebelum kemerdekaan Myanmar secara resmi tercapai. Kematianannya adalah sebuah tragedi bagi negerinya, namun cita-cita beserta idealisme Aung San sekarang telah tersalurkan oleh putrinya Aung San Suu Kyi. Bab-bab setelahnya, mengikuti perjalanan negara Myanmar dan rakyatnya dari masa kolonial Inggris sampai autobiografi Aung San Suu Kyi beserta perjuangan perdamaianya untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar.¹²

Buku yang berjudul *The Authority of Influence: Women and Power in Burmese History* oleh Jessica Harriden merupakan literatur ketiga yang menganalisis akses perempuan terhadap kekuasaan di Myanmar dan bagaimana akses ini telah berkembang dari era klasik sampai era modern. Harriden memperkaya pemahaman

¹¹ Judy L. Hasday, *Aung San Suu Kyi: Activist for Democracy in Myanmar*, New York: Infobase Publishing, 2007, hal. 1-101

¹² Aung San Suu Kyi, *Freedom from Fear: and Other Writings*, Inggris: Penguin Books, 1995, hal. 1-416

yang ada tentang hubungan gender dan kekuasaan di Myanmar. Buku ini terbagi dalam Sembilan bab, yang disusun secara kronologis, dengan bab pertama menguraikan konteks budaya dalam hubungannya dengan gender di Myanmar. Bab dua membahas penggambaran kekuatan perempuan pada era klasik dan pre modern Myanmar. Selanjutnya di bab ketiga, Harriden mencontohkan sikap masyarakat Myanmar terhadap perempuan yang memegang otoritas politik di negerinya. Pemerintahan kolonial Inggris, yang dijelaskan di bab empat, mengubah status perempuan Myanmar tersebut. Penerapan aturan militer pada tahun 1962 merupakan bencana bagi kemajuan perempuan di Myanmar, yang dijelaskan di bab enam. Dua bab terakhir dari buku ini menganalisis posisi perempuan di Myanmar pasca 1988, dengan bab delapan membahas kemajuan perempuan di bawah rezim militer dan bab sembilan yang membahas berbagai organisasi perempuan yang telah dibentuk.¹³

Penulis menggunakan beberapa bahan bacaan yang telah disebutkan sebagai acuan dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian ini. Tulisan karya Judy L. Hasday membahas perjalanan politik Aung San Suu Kyi dengan menjelaskan budaya Myanmar dan ajaran Buddha sebagai pendahalan. Buku *Freedom from Fear* oleh Aung San Suu Kyi juga membahas perjalanan dirinya menuju proses demokratisasi Myanmar dan autobiografi tentang perjalanan kemerdekaan ayahnya Aung San. Begitupula dengan literatur oleh Jessica Harriden yang menganalisis lebih dalam tentang perempuan dan kekuasaan di Myanmar. Dari ketiga literatur tersebut,

¹³ Jessica Harriden, *The Authority of Influence: Women and Power in Burmese History*, Denmark: NIAS Press, 2012, hal. 1-370

semuanya membahas mengenai perjuangan Aung San Suu Kyi dan kontribusinya terhadap kebangkitan demokrasi di Myanmar, masing masing menggunakan pendekatan yang berbeda namun memiliki persepsi yang sama bahwa Aung San Suu Kyi memiliki andil besar dalam berjalannya proses demokratisasi di Myanmar. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan feminisme dengan memfokuskan penelitian kepada bagaimana representasi perempuan dalam gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada film *The Lady*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang melibatkan rakyat didalam sistem pengelolaannya dan setiap individu dalam negara tersebut memiliki hak yang setara dalam setiap pengambilan kebijakan oleh penyelenggara negara. Suatu negara yang menganut paham demokrasi harus memiliki prinsip-prinsip demokrasi yaitu diantaranya: adanya kesetaraan hak bagi setiap individu sebagai warga negara tanpa terkecuali, adanya keikutsertaan setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya kebebasan bagi setiap individu yang dilindungi oleh negara.¹⁴ Gelombang demokrasi yang menerpa negara-negara di Asia Tenggara tidak mempengaruhi Myanmar. Akibatnya, negara ini dikuasai oleh rezim militer hasil kudeta tahun 1962. Maka dari itu, dibutuhkan proses-proses menuju demokrasi sebagaimana dengan ciri negara demokratis salah satunya ialah kekuatan militer tidak mencapuri pemerintahan.

¹⁴ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, New York: The Liberal Arts Press, 1956, hal. 29

Demokratisasi adalah proses menuju demokrasi.¹⁵ Kata “demokratisasi” merujuk pada perubahan-perubahan politik menuju arah yang lebih demokratis.¹⁶ Untuk melihat proses demokrasi suatu negara secara komprehensif, terdapat proses-proses demokratisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan modernisasi, pendekatan transisi dan pendekatan struktural.¹⁷ Tetapi bukan berarti ketiga pendekatan tersebut dapat diterapkan di seluruh negara karena masing-masing karakteristik pemerintahan dari sebuah negara berbeda-beda. Pendekatan transisi sangat sesuai dengan kasus demokratisasi yang terjadi di Myanmar, dimana proses demokrasi tidak berjalan lancar jika tidak ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan transisi ini menekankan pada peranan aktor-aktor dan proses-proses politik dalam transisi aktual dari rezim otoriter menuju rezim yang lebih demokratis. Gerakan, strategi dan tokoh-tokoh pro-demokrasi merupakan bagian dari analisis proses demokratisasi.¹⁸ Myanmar terlalu lama dikendalikan oleh pemerintahan Junta militer yang otoriter, serta cara-cara kekerasan yang dilakukan pemerintahan menyebabkan semakin menguatnya kelompok oposisi dalam melakukan aksi pemberontakan. Kelompok masyarakat ini berjuang keras untuk perubahan kekuasaan dari Junta militer ke pemerintahan sipil yang demokratis. Salah satunya adalah Aung San Suu Kyi, tokoh moral demokrasi di Myanmar, yang

¹⁵ Anders Uhlin. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998, hal 10

¹⁶ David Potter. *Democratization*. UK: Polity Press, 1997, hal 3

¹⁷ Ibid, hal. 10

¹⁸ Guillermo O'Donnell, “Transition from Authoritarianism Rule,” *The John Hopkins University Press* Vol. 3 (1986), hal. 6

membentuk partai oposisi militer *National League for Democracy* (NLD) dan yang paling keras menyerukan demokrasi ke seluruh penjuru Myanmar.

Perspektif feminisme dalam ilmu politik cenderung terfokus pada isu seperti diferensial gender dalam representasi dan partisipasi politik. Kaum feminis berpendapat bahwa yang bersifat politis meliputi kehidupan pribadi dan kehidupan privat (personal), yang didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kaum perempuan dan laki-laki.¹⁹ Feminisme merupakan suatu pandangan dunia yang melakukan perlawanan, yang dikonstruksi dari sudut pandang atau pengalaman-pengalaman suatu kelompok yang termajinalkan.²⁰ Dalam feminis kontemporer, feminisme beranjak dari bagaimana peran gender muncul dan kemudian menjelaskan hubungan antara jenis kelamin (seks) di suatu kelompok masyarakat atau budaya dimanapun.²¹ Karena gender merupakan seperangkat karakteristik konstruksi sosial dan budaya, karakteristik perbedaan gender didasarkan pada sosialisasi tentang bagaimana konsep maskulin dan feminin dibangun secara sosial.²²

Sebagai contoh, karakteristik maskulin adalah rasionalitas, keberanian, kesopanan, dan kuat. Sedangkan sebaliknya bagi karakteristik feminin perempuan

¹⁹ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 2008, hal. 33

²⁰ Jill Steans dan Llyod Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009, hal. 321

²¹ Ibid, hal. 322

²² Lianboi Vaiphei, "Feminist Perspectives and International Relations," *Institute of Lifelong Learning, University of Delhi*, http://vle.du.ac.in/file.php/629/Feminist_Perspectives_and_International_Relations/Feminist_Perspectives_and_International_Relations.pdf, hal. 10

yaitu emosional, ketergantungan, dan lemah.²³ Nilai-nilai yang lebih positif telah dianggap berasal dari laki-laki dan gender dipandang sebagai struktur yang menandakan hubungan kekuasaan. Dengan kata lain, gender adalah sistem hierarki sosial dimana laki-laki lebih dihargai daripada perempuan. Feminisme disini hadir agar membuat struktur ketidaksetaraan tersebut terlihat dalam sistem internasional dengan tujuan untuk menyingkirkannya.

Pergerakan feminisme sudah mulai sejak abad ke-18. Gelombang pergerakan perempuan jaman ini dikenal dengan istilah Feminisme Liberal karena pada umumnya tujuan pergerakan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dimana perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.²⁴ Tokoh penting untuk pergerakan feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft yang mengatakan bahwa:

“Salah satu ciri yang paling universal sekaligus mencolok adalah subordinasi wanita atas pria. Sekalipun saat ini banyak kemajuan-kemajuan politik dan budaya yang diperolehnya, masyarakat tetap menempatkan wanita sebagai subordinasi posisi pria.”²⁵

Dalam feminisme liberal, nalar adalah yang utama bagi perempuan untuk menjadi manusia yang utuh. Berangkat dari pemikiran Wollstonecraft bahwa untuk mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 8-9

²⁴ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, loc.cit

²⁵ Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman*, ed. Deidre Shauna Lynch, New York: W.W. Norton and Company, 2009, hal. 25

perempuan hak politik dan kesempatan untuk maju serta pendidikan yang sama seperti laki-laki.²⁶

Feminisme liberal merupakan salah satu paham dari teori feminisme yang menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam masyarakat dapat dilihat dari ketidaksetaraan yang dibentuk dari partisipasi perempuan di dunia publik, diluar kebutuhan keluarga dan rumah tangga.²⁷ Tujuan dari paham feminisme liberal ini ialah penghapusan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek hukum, politik, sosial dan pendidikan. Perspektif liberal menyatakan bahwa subordinasi perempuan disebabkan oleh praktik sosialisasi gender yang bersifat asimetris, menyingkirkan perempuan dari kehidupan politik.²⁸ Feminisme liberal mempercayai bahwa peran gender tradisional juga membatasi laki-laki sebagaimana membatasi perempuan. Asumsi awal dari posisi liberal adalah bahwa ketika perempuan dibebaskan, laki-laki pun juga akan bebas. Namun, posisi liberal lebih memusatkan pada pembentukan kesempatan bagi perempuan dalam menentang struktur patriarki yang mendasari status rendah perempuan.²⁹

Dalam perspektif feminis liberal, kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik merupakan hal terpenting dalam usaha meningkatkan status perempuan.

Perempuan mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan kemajuan moral

²⁶ Rosemarie, *Feminist Thought*, op.cit

²⁷ Chris Beasley, *What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory*, SAGE Publications: Australia, 1999, hal. 51

²⁸ Judith Wore, *Encyclopedia of Woman and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact on Gender*, London: Lexington Academic Press, 2002, hal. 430

²⁹ Ibid, hal. 431

sehingga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik daripada sebagai makhluk yang terkurung dalam ruang privat di rumah dan keluarga.³⁰ dalam kaitannya dengan negara dan kekuasaan, fokus utama feminisme liberal adalah meningkatkan status perempuan di seluruh dunia, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan mendapatkan akses pada kekuasaan.³¹ Feminisme liberal berpijak pada teori liberalisme yang merupakan sebuah perspektif yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu di atas segalanya.³² Dalam hal ini, teori liberalism memandang negara sebagai wasit yang netral di antara persaingan kepentingan-kepentingan dalam suatu masyarakat yang terbuka dan pluralistik.³³

Mengenai masalah intervensi atau campur tangan negara dalam dunia privat atau domestik, feminisme liberal menyetujui bahwa semakin sedikit individu berhadapan dengan negara di ruang privat mereka adalah semakin baik. Dalam hal intervensi negara di dunia politik, kaum liberal klasik beranggapan bahwa negara yang ideal harus melindungi kebebasan sipil, seperti hak milik, hak menyatakan pendapat dan hak untuk kebebasan.³⁴ Ironisnya, negara belum sepenuhnya adil, terutama pada kaum perempuan, yang membuat gerakan-gerakan feminisme muncul dan menjadikan negara sebagai kendaraan bagi kemajuan perempuan. Meskipun demikian, feminisme liberal menerapkan nilai-nilai (kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan) dan struktur dari demokrasi liberal. Bagi feminisme liberal, nilai-nilai

³⁰ Jean Rhys, *Voyage in the Dark*, New York: W.W. Norton & Company, 1994, hal. 327

³¹ Ibid, hal. 340

³² Ibid, hal. 111

³³ Ibid, hal. 341

³⁴ Rosemarie Tong, *Feminist Thought*, op.cit, hal. 16-17

dan struktur tersebut memiliki potensi untuk mengakhiri penindasan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender di seluruh aspek kehidupan publik.³⁵ Feminisme liberal juga memperjuangkan perempuan untuk terlepas dari peran gender yang asimetris, membuat perempuan inferior dan laki-laki superior. Feminisme liberal bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi yang didukung oleh negara terhadap perempuan dan mendorong negara untuk persamaan hak perempuan.³⁶ Meskipun, negara didominasi oleh laki-laki, seperti Myanmar, feminisme liberal percaya bahwa peningkatan akses perempuan dalam dunia politik dapat mengurangi ketidaksetaraan gender.

Sebagai sebuah proses perpindahan informasi dari komunikator kepada komunikan, sebagaimana yang dikatakan Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa? (*Who? Say what? In which channel? To whom? With what effect?*)³⁷, komunikasi selalu membawa efek yang berbeda bagi penerimanya sehingga pilihan media dan pesan didalamnya pun ditujukan sesuai dengan *target* yang disasar oleh komunikator. Dalam kaitannya dengan perkembangan hubungan internasional, aktor-aktor yang berperan di dunia internasional tak lagi hanyalah negara. Teori pluralisme menyatakan bahwa hubungan internasional tidak hanya tentang hubungan antar negara, melainkan adanya hubungan transnasional dimana terjadinya hubungan dengan individu, kelompok-

³⁵ Alison Jaggar, "Feminist Ethics", loc.cit

³⁶ Jane Pilcher, *Woman in Contemporary Britain: An Introduction*, London: Routledge, 2002, hal. 3

³⁷ Liliweri Alo, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya, 1991, hal. 7

kelompok, dan organisasi yang berasal dari negara-negara yang berbeda.³⁸ Dengan kata lain, suatu hubungan tidak dapat terlaksana tanpa adanya interaksi dan komunikasi yang menimbulkan adanya ketergantungan yang terjadi di antara masyarakat dunia.

Kehadiran media massa menjadi suatu medium untuk proses komunikasi internasional. Peran media dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern di era globalisasi ini, mencakup enam perspektif yaitu sebagai jendela peristiwa sehingga masyarakat bisa melihat apa yang terjadi di dunia internasional. Kedua, sebagai cermin peristiwa yang menyiratkan refleksi kenyataan dari beberapa peristiwa yang telah atau sedang berlangsung di dunia. Ketiga, sebagai *gatekeeper* yang memilih isu atau informasi berdasarkan apa yang layak diketahui oleh masyarakat internasional. Keempat, sebagai *guide* dan *intrepeter* yang mengarahkan informasi dan menerjemahkan pesan dari peristiwa tertentu. Kelima, sebagai forum untuk mewakili berbagai informasi dan gagasan kepada masyarakat, sehingga menciptakan respon dan umpan balik. Terakhir, sebagai mitra komunikasi yang menciptakan komunikasi interaktif.³⁹ Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di Myanmar, sebagaimana yang dijelaskan diatas, media massa khususnya media film dijadikan sebagai medium.

Produk-produk media telah berhasil memberikan dan mencerminkan realitas yang dihadirkan di masyarakat, salah satunya melalui media film. Pengalaman dalam

³⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, UK: Oxford University Press, 2015, hal. 98-99

³⁹ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, op.cit., hal. 66

menikmati film menyerupai pengalaman dalam menghayati bahasa. Artinya orang yang berpengalaman dalam menghayati film, akan lebih banyak melihat dan mendengar dibandingkan orang lain yang jarang melihat film. Seseorang menonton film untuk mencari nilai-nilai yang memperkaya batin.⁴⁰ Hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi masyarakat berdasarkan muatan pesan dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik ini muncul didasarkan atas argumen yang menyatakan bahwa film adalah potret dari masyarakat dimana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.⁴¹

Media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh sesama individual. Fungsi hubungan yang dimiliki media itu sedemikian berpengaruh kepada masyarakat sehingga berkaitan dengan perilaku seseorang, baik yang positif maupun negatif.⁴² Pada era globalisasi dewasa ini, media memiliki pengaruh yang kuat disegala dimensi kehidupan masyarakat. Perkembangan media dalam menyampaikan informasi juga membuat hal tersebut mendominasi kehidupan masyarakat luas yang menyebabkan terbentuknya suatu pola

⁴⁰ Marselli Sumarno, *Dasar-Dasar Apresiasi Film*, Jakarta: Grasinda, 1996, hal. 27.

⁴¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 127.

⁴² Ibid

pikir seragam. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan media yang sangat mudah untuk diakses dan pengalaman sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Fungsi media dari menyampaikan informasi, mempermudah seseorang untuk berkomunikasi serta sebagai hiburan bergeser menjadi eksploitasi dalam penciptaan supremasi media.⁴³ Media massa menyajikan penggambaran masyarakat, dengan membaca, mendengarkan, atau menonton maka seseorang dapat mempelajari nilai-nilai apa yang penting, dan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pemberian makna terhadap realitas yang terjadi di sekitar, salah satunya melalui media film.

1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai bentuk penelitiannya. Metode kualitatif yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah mengutip Sugiyono (2010) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, dan R&D)*,

"Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi."

Proses dan penelitian kualitatif ini akan menjadikan penulis sebagai pemeran kunci dalam mengumpulkan data-data yang nanti akan digunakan sebagai sumber dan acuan dari penulisan ini.

⁴³ Joseph R. Dominick, *The Dynamics of Mass Communication*, New York: McGraw-Hill, Inc., 1993, hal. 39-42.

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan guna mengkaji referensi-referensi yang ada yaitu melalui film *The Lady* dan studi literatur, dimana penulis akan lebih banyak menggunakan buku-buku, jurnal, serta situs. Kemudian cara penulis mengumpulkan data adalah melalui pengumpulan data sekunder, yaitu dimana referensi akan diperoleh melalui buku-buku, *website*, jurnal, situs seperti *BBC*, *CNN*, dan lainnya serta sumber-sumber yang hanya bisa didapatkan melalui institusi baik pemerintahan maupun swasta.

1.7 Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika penulisan ini akan disusun suatu kerangka penulisan yang dituangkan dalam setiap bab atau sub-sub judul mengenai poin-poin penting. Penelitian ini terbagi dalam lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, deskripsi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, kajian literatur, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasannya. Hal-hal yang terdapat di dalam Bab I ini bersifat dasar.

Dalam Bab II, penulis membahas mengenai pemaparan umum tentang negara Myanmar dan status sosial perempuan beserta konsep kekuasaan di Myanmar. Berikut juga tentang politik dan pemerintahan Myanmar era Junta militer dan pemberontakan 8888, dan latar belakang kehidupan Aung San Suu Kyi beserta keterlibatannya dalam aksi demokrasi.

Dalam Bab III, penulis memberikan gambaran mengenai film *The Lady* sebagai representasi perjuangan perempuan di Myanmar.

Dalam Bab IV, penulis mendeskripsikan mengenai bagaimana representasi perempuan dalam gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi di Myanmar pada film *The Lady*.

Bab IV, kesimpulan.